

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami perkembangan masa transisi demokrasi yang begitu pesat setelah adanya perubahan amandemen UUD 1945 pasca orde baru. Perubahan sistem ketatanegaraan yang paling berkembang sebagai salah satu bukti meningkatnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah adanya rumusan konstitusi mengenai keberadaan kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dimana makna yang terkandung didalamnya berarti rakyat berdaulat, bertanggung jawab, serta memiliki hak dan kewajiban secara demokratis untuk ikut didalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dimulai dari berpartisipasi dalam memilih pemimpin negaranya hingga wakil rakyat. (Noviawati, Jurnal Unigal, 2019)

Pemilihan umum (pemilu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pelaksanaannya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan secara periodik setiap 5 tahun. Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Komisi Penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu sebagai perwujudan dari sistem kedaulatan rakyat setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat memiliki hak pilih dan kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat yang akan menjalankan tata kelola pemerintahan untuk 5 tahun kedepan. Adapun fungsi pemilu sebagaimana diketahui diantaranya, sebagai sarana berpartisipasi masyarakat dalam proses politik, alat atau mekanisme bagi

rakyat untuk memilih pemimpin, sarana perwujudan kedaulatan rakyat, dan sarana bagi proses pergantian pemimpin secara konstitusional, sarana bagi pemimpin untuk memperoleh legitimasi. Sebagai sarana partisipasi politik rakyat pemilu diharapkan dapat berjalan dengan benar agar nilai-nilai demokratis dapat diwujudkan, dengan begitu rakyat juga menjadi antusias untuk ikut didalam prosesnya karena hak politik dan suara mereka benar-benar tersalurkan dengan baik. (Noviawati, Jurnal Unigal, 2019)

Dasar hukum penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lembaga negara yang bertugas menjadi penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU RI harus mampu menjalankan tugas penyelenggara pemilu dengan memegang prinsip transparan, professional, penuh integritas, akuntabel, dan gotong royong. Sehingga diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa kendala sehingga partisipasi masyarakat dapat tersalurkan. Selain itu, pemilu serentak tahun 2019 juga merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia dimana pertama kalinya pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakilnya diadakan secara bersamaan. (Dedi, Jurnal Moderat, 2019: 219-220)

Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki hubungan yang erat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dimana partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi sangat berpengaruh terhadap proses legitimasi masyarakat dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, negara-negara penganut sistem demokrasi termasuk Indonesia menjadikan partisipasi politik sebagai salah satu kewajiban besar dalam proses pemerintahan dalam hal ini terkhusus pada proses pemilu. Selain itu, partisipasi politik dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan serta sebagai arena pemenuhan hak-hak politik warga negara. (Arniti, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2020: 330)

Sebagai wujud pemenuhan hak-hak politik warga negara adalah adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan

berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. (Subekti, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014: 2)

Dalam analisis modern partisipasi politik merupakan suatu problematika penting yang terjadi dan banyak dipelajari terutama di negara-negara berkembang. Secara umum Budiardjo, mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan seperti memilih pemimpin negara, serta baik secara langsung maupun tidak ikut memengaruhi kebijakan pemerintah. Dimana didalamnya mencakup berbagai-bagai kegiatan yaitu, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik atau ikut dalam gerakan sosial dengan *direct action*nya. (Budiardjo, 2008: 367)

Sejalan dengan pendapat Budiardjo, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson pun memiliki penjelasan yang sama terkait dengan partisipasi politik. Mereka mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang oleh pelakunya sendiri maupun orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi politik dalam bentuk apapun itu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, atau dapat dikatakan mereka menyakini bahwa tindakan mereka akan mempengaruhi proses perpolitik atau mempunyai efek politik. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik. (Budiardjo, 2008: 368)

Ditahun 2019 Indonesia memasuki masa pesta demokrasi dimana saat itu diadakan pemilihan umum yang dilaksanakan pada bulan April. Pemilihan umum serentak berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU -11/2013 tentang pemilu serentak. Pemilu serentak dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pelaksanaan pemilu serta biaya politik bagi calon peserta kandidat pemilu, kemudian untuk mencegah adanya praktek politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu serentak tahun 2019 adalah

pemilihan umum eksekutif dan legislatif. Model pemilu serentak ini sebelumnya sudah banyak dilakukan di beberapa negara di Amerika, baik tingkat nasional maupun regional. (Harris Dkk, 2014)

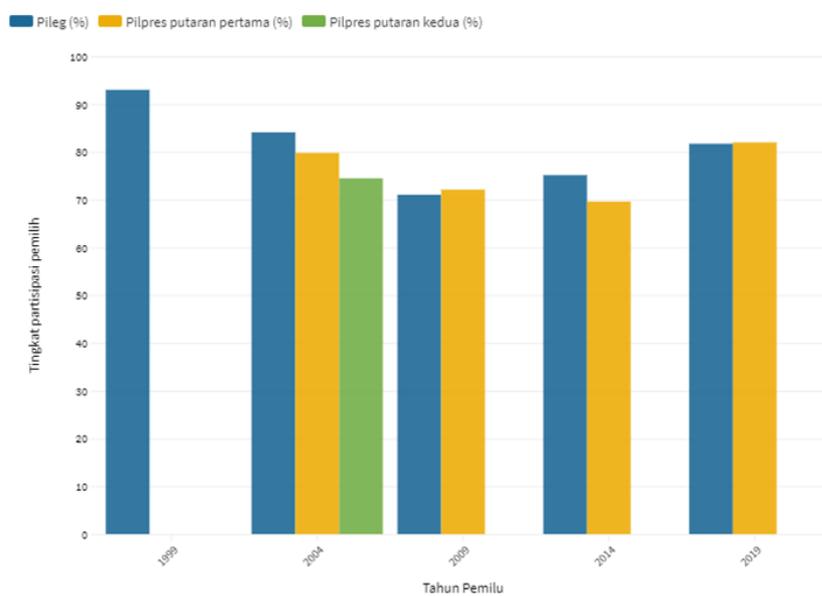
Rangkaian panjang proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dimulai dari penetapan waktu penyelenggaraan, proses kampanye pemilu itu berlangsung, waktu pemilihan umum, sampai pada saat pengumuman hasil pemilu serentak 2019. Dalam rangkaian panjang tersebut tentu saja banyak sekali hal-hal yang terjadi, baik isu-isu yang beredar, konflik dan persoalan-persoalan lainnya.

Selain sebagai sejarah pertama kalinya pemilu serentak dilakukan, pemilu 2019 juga memiliki fakta-fakta menarik lainnya. Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilu 2019 meningkat lebih tajam dibanding pada pemilu 2014, berdasarkan data KPU daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185.732.093 orang, yang terdiri dari 92.802.671 laki-laki dan 92.929.422 perempuan yang tersebar kedalam 805.075 TPS seluruh Indonesia. Dari 27 partai politik peserta pemilu hanya 16 partai politik yang lolos dalam proses verifikasi yang dapat ikut dalam pemilu. (Detik.com, 2019)

Pemilihan umum tahun 2019 memang dipenuhi oleh fenomena-fenomena menarik dalam penyelenggaraannya, seperti dari banyaknya hoax dan isu yang beredar hingga kenaikan tingkat partisipasi masyarakat yang jauh berbeda dari pemilu sebelumnya. Diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 meningkat sebesar 81,97 % pada pilpres dan 81,69 % pada pileg. Hasil tersebut sudah melampaui target yang ditentukan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019 ini. (Kabar24.bisnis.com, 2019)

Pada saat itu kandidat yang bertarung dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 sebagai calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 adalah Joko Widodo-Ma'aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam nomor urut 2. Pemilihan Presiden tahun 2019 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Legislatif tahun 2019 mengingat Pemilihan Umum 2019 yang dilakukan secara serentak. Pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin berhasil memenangkan

pemilihan umum tersebut dengan perolehan suara 55,32%, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 44,68%. (KPU.go.id)



**Gambar 1. Grafik Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Sejak Tahun 1999-2019**

Sumber: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif>

Ditengah maraknya hoax dan konflik-konflik yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, fenomena yang tak kalah menarik adalah meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut. Dibanding dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya angka partisipasi masyarakat meningkat hingga mencapai 5% lebih. Meskipun sempat diragukan, pada kenyataannya jumlah partisipasi masyarakat mampu melampaui target yang ditetapkan KPU dan pemerintah, selain itu tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2019 berhasil menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pasca reformasi tingkat partisipasi masyarakat tertinggi diraih pada saat pilpres tahun 2004 sebagai putaran pertama pemilu yaitu sebesar 79,76%. (Kabar24.bisnis.com, 2019)

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyampaikan kepada wartawan, sekiranya terdapat lima faktor yang mempengaruhi peningkatan angka partisipasi masyarakat yakni, diantaranya faktor daya tarik kandidat yang bertarung, faktor pemilih yang merasa terwakili, faktor persaingan yang ketat, faktor maraknya pemberitaan media, serta faktor gencarnya sosialisasi KPU yang maksimal. Situasi politik yang ramai ditambah dengan adanya pemberitaan media yang begitu luas dapat mendorong adanya semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung calon yang mereka pilih. (Kabar24.bisnis.com, 2019)



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**Gambar 2. Grafik Angka Partisipasi Pilpres DKI Jakarta 2014-2019**

Khusus wilayah Ibukota Jakarta ketua KPU DKI Jakarta mengatakan bahwasanya partisipasi masyarakat DKI Jakarta meningkat hingga 79,23% dan ini merupakan tingkat partisipasi tertinggi di DKI Jakarta sejak masa reformasi (MediaIndonesia.com, 2019). Pada pemilu serentak tahun 2019, KPU DKI Jakarta menetapkan 7.761.598 daftar pemilih tetap sebagai hasil perbaikan tahap ketiga (DPTHP-3). Jumlah pemilih tetap meningkat sebesar 238.497 pemilih dari 7.523.101 pemilih pada tahun 2014. Jumlah tersebut dikarenakan kenaikan jumlah penduduk yang memiliki KTP di Jakarta. Untuk memfasilitasi jumlah pemilih tetap yang meningkat tersebut maka disediakan sebanyak 29.010 tempat

pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta. (Statistik.jakarta.go.id, 2019)

Dari data yang diperoleh khusus wilayah Jakarta Timur jumlah peserta yang menggunakan hak pilihnya meningkat sekitar 5%. Menurut ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardhana, meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat di wilayahnya lantaran adanya beberapa faktor seperti pemilihan umum yang dilakukan serentak yaitu pilpres dan pileg, serta adanya upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. (TribunJakarta.com, 2019)

<b>NO</b>	<b>Wilayah Kab/ Kota</b>	<b>Presentase Partisipasi 2014</b>	<b>Presentase Partisipasi 2019</b>	<b>Presentase Peningkatan Partisipasi</b>
<b>1.</b>	<b>Jakarta Pusat</b>	70,26%	78,06%	7,80%
<b>2.</b>	<b>Jakarta Utara</b>	71,89%	76,52%	4,63%
<b>3.</b>	<b>Kep. Seribu</b>	73,58%	82,00%	8,42%
<b>4.</b>	<b>Jakarta Timur</b>	75,42%	80,46%	5,04%
<b>5.</b>	<b>Jakarta Selatan</b>	71,63%	79,65%	8,02%
<b>6.</b>	<b>Jakarta Barat</b>	70,60%	79,72%	9,12%
	<b>Total</b>	<b>72,23%</b>	<b>79,23%</b>	<b>6%</b>

**Tabel 1. Angka Peningkatan Partisipasi DKI Jakarta 2014-2019**



**Gambar 3. Grafik Peningkatan Angka Partisipasi Pilpres di Jakarta Timur**

Pada pilpres tahun 2014 di wilayah Jakarta Timur jumlah pemilih secara keseluruhan yang ditetapkan sebanyak 2.068.264 dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1.559.920 dari jumlah tersebut maka angka tingkat partisipasi yang diperoleh sebesar 75%, sedangkan di tahun 2019 jumlah pengguna hak pilih meningkat sebanyak 5,46%. Dengan begitu diketahui tingkat partisipasi masyarakat mencapai di wilayah Jakarta Timur mencapai 80,46%. (KPU Kota Jakarta Timur)

**D. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH TINGKAT KAB/KOTA DAN PROVINSI										
PEMILU <b>PPWP</b> TAHUN 2019										
NO.	KAB./KOTA	DATA PEMILIH								
		JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR			PENGGUNA HAK PILIH					
		LK	PR	JUMLAH	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
1.	JAKARTA PUSAT	419,730	422,144	841,874	320,393	76.33%	336,814	79.79%	657,207	78.06%
2.	JAKARTA UTARA	655,029	655,196	1,310,225	485,566	74.13%	517,026	78.91%	1,002,592	76.52%
3.	KEP. SERIBU	11,711	9,663	21,374	9,330	79.67%	8,196	84.82%	17,526	82.00%
4.	JAKARTA TIMUR	1,152,486	1,169,363	2,321,849	902,796	78.33%	965,386	82.56%	1,868,182	80.46%
5.	JAKARTA SELATAN	878,655	894,944	1,773,599	683,348	77.77%	729,265	81.49%	1,412,613	79.65%
6.	JAKARTA BARAT	922,446	918,405	1,840,851	720,955	78.16%	746,499	81.28%	1,467,454	79.72%
<b>TOTAL</b>		<b>4,040,057</b>	<b>4,069,715</b>	<b>8,109,772</b>	<b>3,122,388</b>	<b>77.29%</b>	<b>3,303,186</b>	<b>81.17%</b>	<b>6,425,574</b>	<b>79.23%</b>

**Gambar 4. Angka Partisipasi Di DKI Jakarta Pada Pilpres 2019**

Noni Anggraeni Taunu, 2022

*ANALISIS PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI KASUS MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN BAMBU APUS, LUBANG BUAYA DAN CIPAYUNG)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

Khusus wilayah Jakarta Timur jumlah daftar pemilih tetap pemilihan umum serentak tahun 2019 tercatat sebanyak 2.321.849 pemilih yang terdiri dari 1.152.486 pemilih laki-laki dan 1.169.363 pemilih perempuan. Pemilih tetap tersebut tersebar di 10 Kecamatan Wilayah Jakarta Timur yang difasilitasi sebanyak 8.206 TPS. Kemudian diketahui bahwa jumlah pengguna hak pilih di wilayah Jakarta Timur secara keseluruhan yakni sebanyak 1.868.182. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah DPT dan jumlah pengguna hak pilih terbanyak di DKI Jakarta.

Wilayah	Pasangan Calon			
	Jokowi – Ma’ruf Amin		Prabowo - Sandiaga	
	Jumlah Suara	Persen	Jumlah Suara	Persen
Jakarta Selatan	673.100	48	723.008	52
Jakarta Timur	987.607	54	857.940	46
Jakarta Barat	834.038	58	615.101	42
Jakarta Utara	572.567	58	417.062	42
Jakarta Pusat	333.076	51	315.078	49
Kepulauan Seribu	8.826	52	8.281	48

**Tabel 2. Perolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden di wilayah Jakarta**

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190517190505-32-395871/rekapitulasi-dki-jakarta-jokowi-52-persen-prabowo-48-persen>

Adapun beberapa fakta menarik yang diduga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ditahun 2019 khususnya pada pemilihan presiden, diantaranya sistem pemilu yang diadakan secara serentak, isu-isu yang berkembang baik negatif maupun positif dalam proses kampanye, durasi kampanye yang lebih panjang, adanya isu SARA. (Kompas, 2019)

Penelitian ini menarik bagi peneliti karena peneliti merasa tertarik dan perlu mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat Jakarta Timur sebesar 5,46% dalam pemilihan umum tahun 2019 dimana saat itu Jakarta Timur menjadi wilayah kabupaten/kota di DKI Jakarta dengan jumlah pemilih terbanyak. Selain itu, menurut peneliti fenomena peningkatan partisipasi masyarakat tahun 2019 yang cukup signifikan dimasa reformasi saat ini sejak tahun 2004 adalah hal yang menarik mengingat partisipasi masyarakat pada pemilu sebelum-sebelumnya yang tidak begitu antusias.

Sebagai tolak ukur penelitian, penulis akan mengkaji beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memperdalam topik penelitian. Tinjauan pustaka ini akan berisi ringkasan terkait sebuah tema dari beberapa jurnal, buku, serta dokumen-dokumen lainnya yang menjelaskan teori dan konsep serta informasi yang ada di masa lalu ataupun masa kini, lalu memasukkan pustaka ke dalam topik proposal penelitian. Pada umumnya peneliti kebanyakan menggunakan literature yang didapat dari laporan penelitian, jurnal-jurnal, buku-buku ilmiah, tesis dan disertai karangan-karangan ilmiah, serta sumber-sumber tercetak ataupun elektronik dan lainnya. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa jurnal untuk memberitahukan kepada pembaca tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya berhubungan dengan penelitian penulis dan menghubungkan beberapa literature yang telah dibuat.

Tinjauan pertama berasal dari jurnal karya Ni Ketut Arniti tahun 2020. Berjudul **“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar”**. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa respon masyarakat di Kota Denpasar terhadap dilaksanakannya pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 cukup antusias sehingga tingkat partisipasi politik di wilayah tersebut dapat dikatakan cukup tinggi. Tingginya faktor partisipasi diketahui dipengaruhi oleh beberapa faktor didalamnya yaitu, adanya mobilisasi oleh calon kandidat, relasi aktor-aktor politik baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi serta adanya pemberian penghargaan atau reward bagi masyarakat yang berpartisipasi. Walaupun terbilang tinggi, partisipasi politik di

Kota Denpasar masih dikatakan kurang tepat hal tersebut dikarenakan masih adanya faktor mobilisasi politik yang dilakukan. Sehingga diharapkan untuk kedepannya partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar dapat diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai politik yang benar dan berdasarkan kesadaran politik masyarakat. Penelitian ini memberikan informasi bagi peneliti bahwasanya tingkat partisipasi politik masyarakat dapat saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Dimana faktor-faktor tersebut dapat bersifat baik maupun buruk, sehingga penting sekali dilakukan perubahan dalam hal faktor peningkatan partisipasi politik masyarakat sehingga sesuai dengan nilai dan norma politik yang baik dan benar. Selain itu penelitian ini juga memberikan informasi terkait pentingnya menanamkan kesadaran politik pada masyarakat.

Tinjauan kedua berasal dari jurnal karya Paul Adryani Moento, Fitriani dan Albertus Yosep Maturan. Berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum”**. Dengan mengambil studi kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Merauke, maka hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang digunakan oleh KPU daerah Merauke yakni melalui kegiatan sosialisasi politik yang melibatkan media dan tokoh masyarakat didalamnya. Sosialisasi politik tersebut berisi pemberian materi kepada pemilih pemula yang notabene dipenuhi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa di daerah Merauke. Selain itu strategi lain yang digunakan adalah metode komunikasi politik yang dilakukan bekerja sama dengan organisasi politik yang berisi himbuan KPU daerah Merauke supaya masyarakat diberikan pencerahan tentang proses pemilihan umum. Untuk selanjutnya, KPU daerah Merauke melakukan penetapan daftar pemilih tetap yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan terkait. Dari penelitian tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya kegiatan sosialisasi politik dan komunikasi politik yang berjalan dengan baik dan benar sangat berdampak terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat. Melalui kegiatan tersebutlah masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang

penting terkait dengan sistem politik terlebih khusus pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum.

Tinjauan ketiga berasal dari jurnal karya Joni Hermanto, dkk. Berjudul **“Pengaruh Isu, Figur, Rekam Jejak dan Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pilpres Tahun 2019”**. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh isu, figure, rekam jejak hingga partai politik terhadap partisipasi pemilih dalam pilpres tahun 2019. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya isu dapat mempengaruhi cara berpikir ataupun pengambilan tindakan individu maupun kelompok, lalu figur memiliki pengaruh yang besar dalam hal kepemimpinan seseorang baik dalam suatu negara, lembaga, swasta, partai politik dan pemerintahan yang dapat dinilai oleh masyarakat. Kemudian rekam jejak dimana rekam jejak dapat mempengaruhi penilaian masyarakat kepada calon pemimpinnya, guna mengetahui keberadaan sesungguhnya seorang calon pemimpin tersebut dapat dikatakan juga sebagai petunjuk, terakhir partai politik sebagai salah satu komponen yang memiliki pengaruh besar dalam mendukung kemajuan negara, sebagai fasilitator bagi rakyat dengan pemerintah oleh karena itu partai politik tentu saja dapat mempengaruhi partisipasi politik individu melalui visi dan misi, serta peran yang dilakukan ditengah masyarakat. Keempat indikator tersebut masing-masing memiliki pengaruh yang besar guna mendorong seseorang untuk berpartisipasi.

Tinjauan keempat berasal dari jurnal karya Rachmad Budianto. Berjudul **“Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda”**. Hasil penelitian dengan metode kuantitatif tersebut menunjukkan bahwasanya variabel X (pendidikan politik) memiliki skor terendah pada indikator sikap politik dan skor tertinggi diraih oleh indikator pengetahuan politik responden dimana hal tersebut berarti masyarakat cukup mengetahui tentang pendidikan politik, sehingga hal tersebut menyatakan bahwasanya jumlah masyarakat pada indikator tertinggi cukup memberikan pengaruh pada sikap politik masyarakat yang merupakan indikator terendah. Adapun pada variabel Y (partisipasi masyarakat dalam pemilu) menunjukkan kondisi

psikologi sebagai indikator dengan skor terendah dalam kriteria tidak mampu. Kemudian skor indikator tertinggi diraih oleh pemberian suara responden dalam kriteria jarang. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang cukup dan rendahnya sikap politik masyarakat berdampak pada tingkat partisipasi dalam setiap pemilu, lalu responden yang kurang memiliki pendidikan politik yang baik berakibat kepada tidak berkembangnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya ikut berpartisipasi pada pemilihan umum. Penelitian ini memberi informasi kepada peneliti mengenai pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat karena hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap sikap politik dan pengembangan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam sistem politik salah satunya pada pemilihan umum.

Tinjauan kelima berasal dari jurnal karya Dudi Warsudin. Berjudul **“Optimalisasi KPU Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu”**. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bagaimana peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya diperlukan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lain, lembaga masyarakat baik di pusat maupun daerah. Penguatan terhadap lembaga KPU sendiri dengan cara menjalin kerjasama dan membuka ruang serta - mengembangkan fungsinya, yang dapat berbentuk pelaksanaan pendidikan demokrasi sampai pemberian kewenangan untuk membuat aturan yang bersifat regulative bagi KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, selain itu pihak pemerintah dapat membantu optimalisasi tersebut dengan cara melaksanakan publikasi pelaksanaan pemilu dari pusat sampai tingkat desa dengan melibatkan aparatur terkait termasuk RT dan RW. Penelitian ini memberikan informasi bagi peneliti bahwasanya optimalisasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat dilakukan hanya oleh KPU saja. Koordinasi dan kerjasama menjadi hal yang penting guna melakukan optimalisasi tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat. Keterlibatan komponen-komponen pemerintahan dari pusat sampai daerah termasuk desa didalamnya sangatlah diperlukan dalam menjangkau seluruh masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi didalam kegiatan politik termasuk pemilihan umum didalamnya.

Tinjauan keenam berasal dari jurnal karya Mohammad Soud Alelaimat. Berjudul **“Factors Affecting Political Participation (Jordanian Universities Students) Voting: Field Study 2017-2018”**. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di kalangan mahasiswa Universitas Yordania khususnya dalam memberikan suara pada pemilihan umum.

Tinjauan ketujuh berasal dari jurnal karya Ni Wayan Widhiasthini, Nyoman Sri Subawa, Nyoman Sedana, dan Ni Putu Intan Permatasari. Berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali”**. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Provinsi Bali. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa faktor penghambat masyarakat untuk menjadi sukarelawan pemilihan kepala daerah yaitu faktor tidak memiliki kompetensi, faktor geografis, dan faktor tidak independen. Perlu diketahui bahwasanya faktor-faktor tersebut adalah hasil reduksi dari berbagai faktor lainnya. Adapun faktor tidak memiliki kompetensi terdiri dari tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang politik, tidak ada motivasi sampai tidak adanya jaringan dalam kepemiluan. Faktor geografis yang terdiri dari jarak lokasi sukaelawan dan tempat tinggal, tidak ada waktu bahkan karena adanya faktor pekerjaan tetap lainnya. Faktor tidak independen merupakan faktor yang biasanya terdiri dari anggota partai serta tidak memiliki idealism demokrasi. Setelah melihat faktor-faktor penghambat tersebut, kemudian penulis dalam penelitian ini memberikan sumbangsih rekomendasi terkait solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat diatas yakni diantaranya adanya penerapan kebijakan yang benar dan tepat yang berfungsi dalam meningkatkan partisipasi dan kesukarelaan masyarakat untuk terlibat pada dunia politik dengan menggunakan hak politik mereka. Penelitian ini memberikan informasi pada peneliti bahwasanya faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi dalam masyarakat terdiri dari banyak elemen yang menyebabkan faktor penghambat tersebut dapat terjadi dan hal tersebut haruslah menjadi perhatian kita bersama untuk dapat

mengatasinya karena pada dasarnya banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

Tinjauan kedelapan berasal dari jurnal karya Aditya Perdana dan Delia Wildianti. Berjudul **“Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”**. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana narasi kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon presiden dan wakilnya pada tahun 2019 dalam mempengaruhi perilaku pemilih terkhusus terhadap partisipasi politik mereka yang dinilai masih belum maksimal, dikarenakan beberapa hal seperti isu-isu yang digunakan masih berputar dengan isu politik identitas dan hal sentimental lainnya dimana kebanyakan isu tersebut tersebar di media sosial. Sehingga dengan begitu tak dapat disangkal bahwasanya pada pilpres 2019 banyak konflik terjadi yang disebabkan isu-isu tersebut. Media sosial sebagai salah satu media yang berdampak besar dalam proses kampanye dan pengaruhnya terhadap perilaku dan partisipasi pemilih dinilai dalam artikel ini memerlukan regulasi yang lebih lagi terkait penggunaannya. Selain itu, penyebaran gagasan dan ide kampanye dari para kandidat dalam pemilihan mendatang juga diharapkan dapat mengurangi isu-isu terkait politik identitas, melainkan berfokus pada isu yang lebih penting seperti ekonomi, kesejahteraan dan lainnya.

Tinjauan kesembilan berasal dari jurnal karya Budiyo. Berjudul **“Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang PILKADA DKI JAKARTA 2017”**. Memiliki persamaan wilayah penelitian yakni sama-sama DKI Jakarta, namun penelitian ini berfokus pada kota Jakarta Timur. Hasil penelitian dari tinjauan Pustaka kesembilan ini menjelaskan bagaimana peran media sosial dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dimana dijelaskan media sosial sendiri memiliki beberapa peran seperti media sosialisasi, media komunikasi kandidat dengan masyarakat sebagai calon pemilih. Feedback yang timbul dalam narasi kampanye melalui media sosial biasanya bersifat positif dan negatif. Namun dalam jurnal ini media sosial dinilai dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam proses kehidupan, terlebih dalam ajang pilkada, pilpres maupun pileg.

Dimana dalam proses penggunaannya tentu saja akan berdampak pada perspektif, perilaku seorang pemilih dalam partisipasi mereka dalam politik.

Tinjauan kesepuluh berasal dari jurnal karya Anang Dony Irawan. Berjudul **“Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019”**. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan politik kepada para pemilih menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019 sangatlah penting, selain sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pendidikan politik bagi pemilih menjadi upaya dalam mewujudkan pemilih yang berdaulat. Pendidikan politik diberikan dalam bentuk sosialisasi memang bukanlah hal yang mudah, perbedaan pola pikir, pemahaman dan pilihan politik menjadi salah satu faktor pendidikan politik tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, peran Komisi Pemilihan Umum disini sangatlah penting selain sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat salah satunya dengan cara melaksanakan sosialisasi. Namun dari hasil penelitian, peneliti menemukan adanya ketidakmerataan KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik, pendidikan pemilihan dan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 2019. Penelitian ini memberikan informasi betapa pentingnya pendidikan politik bagi para pemilih/ peserta pemilihan umum sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Maka dari itu diharapkan peran lembaga-lembaga terkait dalam mengintensifkan pelaksanaan pendidikan politik, serta penguatan akan adanya aturan teknis terkait pendidikan politik tersebut, selain itu masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik.

Berdasarkan uraian dari tinjauan Pustaka diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu. Pertama, fokus objek penelitian terdapat partisipasi masyarakat di wilayah Jakarta Timur dalam pemilihan presiden tahun 2019. Kedua, terkait dengan teori dan konsep yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dan konsep partisipasi politik, dan pemilihan umum yang didalamnya mencakup pemilihan presiden. Ketiga, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

adanya peningkatan partisipasi masyarakat di wilayah Jakarta Timur dalam pemilihan presiden tahun 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta-fakta terkait peningkatan partisipasi masyarakat dimana, tentu saja peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor didalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden tahun 2019 di Jakarta Timur?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dengan mengetahui adanya peningkatan partisipasi masyarakat di wilayah Jakarta Timur dalam pemilihan umum 2019 terkhusus pilpres. Maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yakni guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Jakarta Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna bagi penulis, mahasiswa dan pembaca. Kegunaan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah serta memperdalam wawasan penulis, selain itu penulisan ini dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir penulis sebagai mahasiswa Ilmu Politik UPNVJ.

#### **b. Bagi Pembaca**

Diharapkan tulisan ini dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan pada penelitian dimasa yang akan datang dan juga bisa menjadi referensi bagi

peneliti-peneliti lainnya, selain itu dapat juga dijadikan acuan bagi pelaksanaan pemilu kedepannya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yakni untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden 2019 khususnya di wilayah Jakarta Timur.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bagian bab pertama ini, mempunyai isi mengenai signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, berisi tentang kajian-kajian terdahulu yang mempunyai topik masalah yang serupa dengan topik yang diambil oleh peneliti, serta berisi tentang konsep dan teori dasar yang hendak digunakan oleh peneliti dalam penelitian dan dalam kerangka berpikir penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik analisis data, serta waktu dan tempat penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan berisi paparan temuan penelitian di lapangan sesuai dengan latar belakang permasalahan, yaitu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden tahun 2019 di wilayah Jakarta Timur, serta menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan.

#### **IV. 1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.2 Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Wilayah Kota Jakarta Timur**

#### **4.1.3 Hasil Penelitian Kuantitatif**

#### **4.1.4 Hasil Penelitian Kualitatif**

#### **4.1.5 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Jakarta Timur pada Pilpres tahun 2019**

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan dan penyelesaian penelitian, selain itu adapun saran sebagai alternative untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang terkait dengan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi keseluruhan daftar referensi yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun proposal penelitian ini.

## **1.6 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terkait dengan rumusan masalah, karena sifatnya yang sementara maka dari itu diperlukan pembuktian kebenarannya melalui data empiris yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini hipotesis dibedakan menjadi dua yaitu, hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Masing-masing hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- $H_0$ : Tidak terdapat pengaruh antara variabel faktor-faktor partisipasi politik masyarakat terhadap keputusan partisipasi politik masyarakat di Kota Jakarta Timur.
- $H_a$ : Terdapat pengaruh antara variabel faktor-faktor partisipasi politik masyarakat terhadap keputusan partisipasi politik masyarakat di Kota Jakarta Timur.